



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

JALAN RAGUNAN NOMOR 29 PASAR MINGGU, JAKARTA 12460 KOTAK POS 76, PSM
TELEPON (021) 7806202, 7806203, 7806204
WEBSITE: brmp.pertanian.go.id

Nomor : B-809/HM.130/H.1/03/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Surat Keputusan Penetapan
PPID Pelaksana Lingkup BRMP

9 Maret 2026

Yth.

1. Kepala Pusat dan Balai Besar

2. Kepala Balai dan Loka

Lingkup BRMP

di

tempat

Dalam rangka menjamin terselenggaranya pengelolaan dan pelayanan informasi publik secara efektif dan tertib pada satuan kerja lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, serta menindaklanjuti Surat Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 94/Kpts./KP.240/A/01/2026 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Eselon I Kementerian Pertanian, bersama ini kami sampaikan Surat Keputusan Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian nomor 21/Kpts/HM.130/H/01/2026 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Unit Kerja dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Unit Pelaksana Teknis lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (SK terlampir).

Sehubungan dengan hal tersebut, mohon Saudara dapat memperbarui SK Penunjukan PPID pada satuan kerja masing-masing.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, disampaikan terima kasih.

Ditandatangani secara elektronik oleh
Sekretaris Badan Perakitan dan
Modernisasi Pertanian,



Husnain, M.P., M.Sc., Ph.D.
NIP 197309102001122001

Tembusan:

Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

JALAN RAGUNAN NO. 29 PASAR MINGGU JAKARTA 12540 KOTAK POS 76 PSM

TELEPON (021) 7806202, 7806203, 7806204

WEBSITE: www.brmp.pertanian.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
NOMOR 21/Kpts/HM.130/H/01/2026

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA UNIT KERJA DAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PELAKSANA UNIT PELAKSANA TEKNIS LINGKUP
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan dan pelayanan informasi publik dan dokumentasi pada Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian mempunyai peran penting dalam memberikan informasi terkait kebijakan penyelenggaraan perakitan dan modernisasi bidang pertanian serta membantu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kinerja Badan Publik;
- b. bahwa dalam rangka mengkoordinasikan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pengamanan, dan pelayanan Informasi Publik pada Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis secara cepat, tepat, dan sederhana kepada pemohon informasi, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Unit Kerja dan PPID Pelaksana Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
- c. bahwa pejabat/pegawai yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu sebagai Pejabat PPID Pelaksana Unit Kerja dan PPID Pelaksana Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Unit Kerja dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);
6. Keputusan Presiden Nomor 55/TPA Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2025 tentang Layanan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 20);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 250) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39 tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1197);
11. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 94/Kpts/KP.240/A/01/2026 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA UNIT KERJA DAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA UNIT PELAKSANA TEKNIK LINGKUP BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN.

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Unit Kerja (PPID Pelaksana UK) dan Pelaksana Unit Pelaksana Teknis (PPID Pelaksana UPT) dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : PPID Pelaksana UK dan PPID Pelaksana UPT sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:
- mengoordinasikan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pengamanan, dan pelayanan informasi publik pada unit kerja/unit pelaksana teknis lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian secara cepat, tepat, dan sederhana;
 - menyiapkan bahan pengujian konsekuensi pada unit kerja/unit pelaksana teknis lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
 - melakukan pengelolaan, pemeliharaan, pemutakhiran, dan menerbitkan Daftar Informasi Publik pada unit kerja/unit pelaksana teknis lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
 - menyiapkan bahan klasifikasi informasi publik;
 - menyiapkan saran/tanggapan atas permohonan, keberatan dan/atau sengketa pelayanan informasi publik;
 - melakukan fasilitasi terhadap sengketa informasi publik; dan
 - menyampaikan laporan bulanan dan tahunan secara berkala kepada PPID Pelaksana Eselon I Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian dan PPID Utama Kementerian Pertanian.
- KETIGA : Seluruh biaya yang diperlukan sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) masing-masing UK/UPT lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Nomor 647/Kpts/OT.050/H/05/2025 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Unit Kerja dan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Januari 2026



KEPALA BADAN PERAKITAN DAN
MODERNISASI PERTANIAN,

FADJRY DJUFRY

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Kepala Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERAKITAN
DAN MODERNISASI PERTANIAN
NOMOR 21/Kpts/HM.130/H/01/2026
TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA UNIT KERJA DAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PELAKSANA UNIT
PELAKSANA TEKNIS LINGKUP BADAN
PERAKITAN DAN MODERNISASI
PERTANIAN

PPID PELAKSANA UNIT KERJA
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

NO.	UNIT KERJA	PPID PELAKSANA UK
1.	Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Pangan	Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Pangan
2.	Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura	Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura
3.	Pusat Perakitan Modernisasi Pertanian Perkebunan	Kepala Pusat Perakitan Modernisasi Pertanian Perkebunan
4.	Pusat Perakitan dan Modernisasi Peternakan dan Kesehatan Hewan	Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Peternakan dan Kesehatan Hewan

PPID PELAKSANA UNIT PELAKSANA TEKNIS
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

NO.	UNIT PELAKSANA TEKNIS	PPID PELAKSANA UPT
1.	Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Padi	Kepala Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Padi
2.	Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner	Kepala Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner
3.	Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian	Kepala Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian
4.	Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Mekanisasi Pertanian	Kepala Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Mekanisasi Pertanian
5.	Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian	Kepala Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian
6.	Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian	Kepala Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian
7.	Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian	Kepala Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian

8.	Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Aceh	Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Aceh
9.	Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Utara	Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Utara
10.	Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Barat	Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Barat
11.	Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Riau	Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Riau
12.	Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau	Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau
13.	Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jambi	Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jambi
14.	Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Bengkulu	Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Bengkulu
15.	Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Selatan	Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Selatan
16.	Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Bangka Belitung	Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Bangka Belitung
17.	Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Lampung	Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Lampung
18.	Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta	Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta
19.	Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Barat	Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Barat
20.	Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Banten	Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Banten
21.	Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Tengah	Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Tengah
22.	Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Yogyakarta	Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Yogyakarta
23.	Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Timur	Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Timur
24.	Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Bali	Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Bali
25.	Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Barat	Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Barat
26.	Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah	Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah
27.	Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Selatan	Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Selatan
28.	Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Timur	Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Timur

29.	Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Utara	Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Utara
30.	Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Barat	Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Barat
31.	Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo	Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo
32.	Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Tengah	Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Tengah
33.	Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan	Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan
34.	Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Tenggara	Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Tenggara
35.	Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Nusa Tenggara Barat	Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Nusa Tenggara Barat
36.	Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Nusa Tenggara Timur	Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Nusa Tenggara Timur
37.	Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku	Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku
38.	Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku Utara	Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku Utara
39.	Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Papua	Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Papua
40.	Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat	Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat
41.	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Aneka Kacang	Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Aneka Kacang
42.	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Serealia	Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Serealia
43.	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Sayuran	Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Sayuran
44.	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Buah Tropika	Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Buah Tropika
45.	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Hias	Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Hias
46.	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika	Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika
47.	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik	Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik
48.	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar	Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar
49.	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat	Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat
50.	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Palma	Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Palma

51.	Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak	Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak
52.	Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk	Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk
53.	Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian	Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian
54.	Balai Perakitan dan Pengujian Pertanian Lahan Rawa	Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Pertanian Lahan Rawa
55.	Balai Perakitan dan Pengujian Agroklimat dan Hidrologi Pertanian	Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Agroklimat dan Hidrologi Pertanian
56.	Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian	Kepala Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian
57.	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Utara	Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Utara
58.	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Selatan	Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Selatan
59.	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat Daya	Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat Daya
60.	Loka Perakitan dan Pengujian Tanaman Aneka Umbi	Kepala Loka Perakitan dan Pengujian Tanaman Aneka Umbi
61.	Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Besar	Kepala Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Besar
62.	Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Kecil	Kepala Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Kecil
63.	Loka Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Tengah	Kepala Loka Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Tengah
64.	Loka Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Pegunungan	Kepala Loka Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Pegunungan



KEPALA BADAN PERAKITAN DAN
MODERNISASI PERTANIAN,

FADJRY DJUFRY